

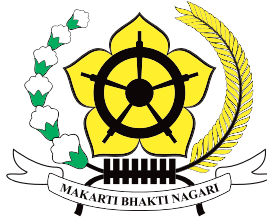
PROSIDING RAKORNAS LITBANG

PERAN KELITBANGAN DAERAH DALAM MEWUJUDKAN *SMART ASN* DI DAERAH

Palembang, 26 April 2016



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV



Prosiding Rakor

**Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan
Smart ASN di Daerah**

Tim Penyusun

Hilma Yuniasti, Rati Sumanti, M. Ikhsan, Ervina Yunita
Henri Prianto Sinurat

Tim Pelaksana

Nurul Hidayah, Hilma Yuniasti, Rati Sumanti, M. Ikhsan
Ervina Yunita, Henri Prianto Sinurat

Layout

Hilma Yuniasti

Hak Penerbit Pada :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV

Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar 23352

Telp. (0651) 8010900, Fax. (0651) 7552568

Website : www.lan.go.id

Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan Smart ASN di Daerah

14,8 x 21 cm; iv + 54 hal

ISBN 978-602-72014-5-3

Tim Penyusun

Hilma Yuniasti, Rati Sumanti, M. Ikhsan, Ervina Yunita

Henri Prianto Sinurat

Tim Pelaksana

Nurul Hidayah, Hilma Yuniasti, Rati Sumanti, M. Ikhsan

Ervina Yunita, Henri Prianto Sinurat

Layout

Hilma Yuniasti

Hak Penerbit Pada :

Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV

Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah, Aceh Besar 23352

Telp. (0651) 8010900, Fax. (0651) 7552568

Website : www.lan.go.id

KATA PENGANTAR

Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan secercah harapan bagi terwujudnya Aparatur Sipil Negara yang profesional. Hal ini sejalan pula dengan agenda besar Reformasi Birokrasi yang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) telah memasuki fase ke 3 dengan sasaran terwujudnya “*Smart ASN*”. Jika pada fase sebelumnya menitikberatkan pada tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi, maka fase yang dimulai pada tahun 2015 hingga 2019 lebih meningkatkan kualitas sumber daya aparatur.

Dalam mewujudkan *Smart ASN* tentunya diperlukan berbagai upaya agar Aparatur Sipil Negara tidak hanya memiliki integritas dan profesional saja akan tetapi juga mampu membaca peluang, mengidentifikasi tantangan dan mengatasi setiap permasalahan dalam memasuki era persaingan global.

Untuk maksud tersebut, rakor yang bertema “Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan *Smart ASN*” kami lakukan dengan tujuan memetakan peran kelitbangan di daerah dalam mewujudkan *smart ASN*, inovasi apa saja yang dilakukan daerah serta tetap menjaga jejaring kelitbangan yang nantinya diharapkan dapat bersinergis dan saling melengkapi untuk berkontribusi pada upaya mewujudkan *Smart ASN*.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya sehingga Rakor Litbang se-Sumatera dapat dilaksanakan. Semoga bermanfaat dan dapat berkontribusi dalam kebijakan pemerintah khususnya dalam peningkatan sumber daya aparatur.

Aceh Besar, April 2016
Kepala PKP2A IV LAN,



Ir. Faizal Adriansyah, M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Lampiran	iv
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
- Tujuan Rakor	2
- Hasil yang Diharapkan	2
- Target Peserta dan Penerima Manfaat	2
- Narasumber	3
- Jadwal, Lokus, Tahapan dan Strategi Pencapaian	3
B. Sambutan Kepala Bidang Kajian Kebijakan Inovasi Administrasi Negara	4
C. Arahan Deputi Bidang Kajian Kebijakan	6
Bab II Pembahasan Materi	7
A. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah Menuju <i>Smart</i> ASN	7
B. Peran Balitbangnovda dalam Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Selatan	19
C. Peran Kelitbang Daerah dalam Mewujudkan <i>Smart</i> ASN	29
D. Tanya Jawab	41
E. Hasil Diskusi Rakornas Kelitbang	44
Bab III Kesimpulan dan Rekomendasi	46
A. Kesimpulan	46
B. Rekomendasi	47
DAFTARLAMPIRAN	49
Lampiran 1 SK Tim dan Jadwal Rakornas Litbang	49
Lampiran 2 Foto-foto Kegiatan	52

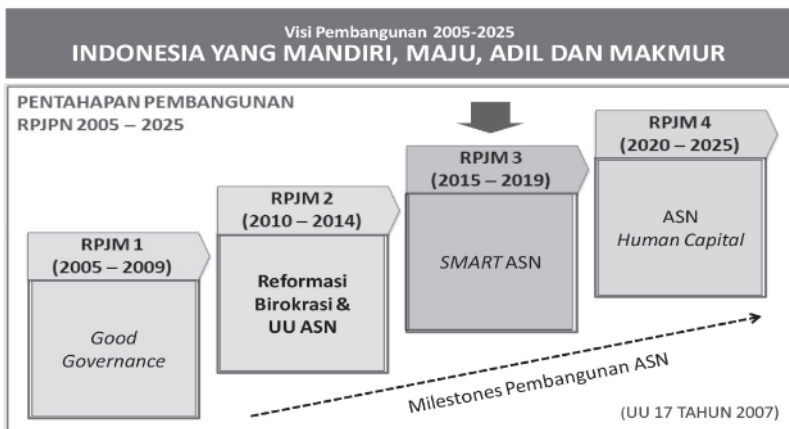
BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) adalah tuntutan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur. Sumber daya aparatur merupakan pilar pembangunan nasional, oleh karena itu harus dikelola dan dikembangkan melalui manajemen ASN yang profesional. Sebelum lahirnya UU ASN, pelaksanaan manajemen ASN belum didasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan manajemen ASN yang terdapat dalam UU ASN diselenggarakan secara sistem merit, yaitu didasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan.

Pelaksanaan manajemen ASN berbasis sistem merit sejalan dengan agenda reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional ke 3 (2014-2019) dengan sasaran terwujudnya “*Smart ASN*”.

RPJMN 2015-2019 ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025



Ada sekitar 4,7 juta pegawai ASN di Indonesia yang menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Jika dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik maka dapat tercipta *smart* ASN yang pandai berintegritas, profesional, kreatif dan memiliki segudang inovasi. Hal ini guna meningkatkan kapasitas ASN yang berkelas dunia. Untuk mencapai hal tersebut, Pemerintah menggulirkan tiga program, yakni perencanaan yang sesuai dengan arah pembangunan dan kebutuhan, rekrutmen ASN yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme serta terciptanya profesionalisme ASN. Lebih lanjut juga bahwa Pemerintah akan menargetkan sejumlah capaian kapasitas ASN, yakni ASN berwawasan global atau internasional, penguasaan bahasa asing, penguasaan IPTEK, serta *high collaboration* dan *networking*.

Terkait hal tersebut, kelitbangan daerah tentu memiliki peran yang sangat besar untuk berkontribusi memberikan saran, pemikiran melalui hasil penelitian atau telaahan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya *smart* ASN. Atas dasar pemikiran di atas, maka Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A IV) Lembaga Administrasi Negara, memandang perlu melakukan Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangan Se-Sumatera, untuk membahas peran kelitbangan di daerah dalam mengoptimalkan peran kelitbangan daerah dalam mewujudkan *smart* ASN di daerah.

Tujuan Rakor

1. Memetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan *smart* ASN;
2. Memetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian *smart* ASN;
3. Membangun dan menjaga jejaring kelitbangan manajemen ASN.

Hasil yang Diharapkan

1. Terpetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan *smart* ASN;
2. Terpetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian *smart* ASN;
3. Menjaga kesinambungan program jejaring kelitbangan manajemen ASN.

Target Peserta dan Penerima Manfaat

Peserta berjumlah 40 orang, yang meliputi:

1. Kedeputusan Bidang Kajian Kebijakan LAN-RI.
2. Kedeputusan Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN-RI.

3. Kedeputusan Bidang Diklat LAN-RI.
4. Kepala PKP2A I, II, dan III.
5. Kepala BappedaSe-Sumatera.
6. Kepala Balitbangda Se-Sumatera.

Narasumber

- o Erfi Muthmainah, SS, MA(Kepala Pusat Kajian Inovasi Pelayanan Publik LAN RI).
- o Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara).
- o DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumatera Selatan).

Jadwal, Lokus, Tahapan dan Strategi Pencapaian

Rakor dilaksanakan pada Selasa, 26 April 2016 di Kantor Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pola diskusi panel. Diawali dengan pemaparan materi oleh narasumber kemudian dilanjutkan dengan pembentukan diskusi kelompok serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut. Untuk Tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penyempurnan *term of reference* (ToR).
2. Penjajakan kemitraan dengan Balitbangnovda Sumatera Selatan (Konsolidasi).
3. Rapat Kepanitiaan.
4. Pengiriman undangan narasumber dan peserta Rakor.
5. Penyelenggaraan Rakor.
6. Pelaporan Rakor.

B. Sambutan Kepala Bidang Kajian Kebijakan Inovasi Administrasi Negara

Bahwa pelaksanaan Rakor Kajian di Palembang ini merupakan Rakor ke 5 sejak berdirinya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur IV (PKP2A) LAN RI.

Sebagai perpanjangan tangan LAN di wilayah Sumatera, dalam upaya untuk terus mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi, tentunya kami sangat ingin membangun jejaring yang lebih luas khususnya dalam Penelitian dan Pengembangan yang menjadi salah satu *concern* kita.

Jejaring yang mulai dibangun sejak pelaksanaan rakor 2014 di Banda Aceh, dilanjutkan di Padang, Sumatera Barat tahun 2015 dan pada kesempatan ini Rakornas Litbang se-sumatera dapat kita laksanakan di Palembang. Hal ini tentu atas dukungan Bapak Sekda dan niat baik terhadap kesinambungan Jejaring Litbang oleh Kepala Badan LitbangNov Sumsel, bapak Alamsyah dan teman-teman. Untuk itu, atas nama LAN kami ucapkan terimakasih atas keikhlasan memfasilitasi kegiatan ini.

Rapat koordinasi yang bersifat nasional yang bertema “Peran Kelitbangan Darah dalam Mewujudkan Smart ASN” dilatar belakangi oleh keprihatinan kita terhadap masih lemahnya kita dalam menghadapi persaingan global. Kita belum memiliki peran yang berarti dalam menghadapi MEA 2015. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparatur yang masih jauh dari harapan. Untuk itu, memasuki fase ketiga menuju fase Keempat dalam agenda Reformasi Birokrasi, maka diharapkan pada Tahun 2019 kita telah memiliki *Smart ASN* yang mampu mewujudkan aparatur kelas dunia. Karenanya, kita menyadari salah satu peran kelitbangan dalam mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional. Untuk itu, rakor kali ini bertujuan, memetakan peran kelitbangan dalam mewujudkan smart ASN, memetakan inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian *smart ASN*, membangun dan menjaga jejaring kelitbangan manajemen ASN, sehingga rakor ini akan menghasilkan rekomendasi yang berarti melalui terpetakannya peran kelitbangan dalam mewujudkan *smart ASN*, terpetakannya inovasi-inovasi di daerah dalam rangka pencapaian smart ASN dan yang terakhir , kesinambungan program jejaring kelitbangan manajemen ASN dapat terus terjaga.

Untuk memperkuat substansi dimaksud maka selaku narasumber rakor adalah Kapus Inovasi pelayan Publik LAN RI, Kabid Kajian

Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, serta Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah provinsi Sumatera Selatan sebagai praktisi Inovasi Daerah.

Adapun peserta berjumlah 40 orang, yang terdiri dari unsur: Kedeputian Bidang Kajian Kebijakan LAN-RI, Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara LAN-RI, Kedeputian Bidang Diklat LAN-RI, PKP2A I, II, dan III, Bappeda Se-Sumatera, Balitbangda Se-Sumatera.

Kami tidak salah memilih Sumatera Selatan sebagai Rakor tahun ini, mengingat Sumatera selatan sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki Sistem Inovasi Daerah yang merupakan bagian penting dalam upaya menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Kepala Bidang KKIAN PKP2A IV LAN,
Nurul Hidayah, SH, M.Si

C. Arahan Deputi Bidang Kajian Kebijakan

Rakornas yang bertema “Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan *Smart ASN*” dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih lemahnya kita dalam menghadapi persaingan global. Kita belum memiliki peran yang berarti dalam menghadapi MEA 2015. Hal ini tidak lepas dari peran serta aparatur yang masih jauh dari harapan. Untuk itu, memasuki fase ketiga dalam agenda reformasi birokrasi, maka diharapkan pada 2019 kita memiliki *Smart ASN* yang mampu mewujudkan aparatur kelas dunia. Kita menyadari salah satu peran kelitbangan adalah mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional.

Lembaga penelitian dan pengembangan harus peka terhadap isu-isu aktual dan isu strategis yang sedang berkembang. Perlu dicermati bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.

Bagi lembaga penelitian dan pengembangan, data merupakan hal yang sangat penting. Lembaga litbang harus mempunyai *database* yang lengkap dan akurat agar dapat menjadi rujukan bagi instansi-instansi lain.

Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI,
Erfi Muthmainah, SS, MA

BAB II PEMBAHASAN MATERI

- A. Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah Menuju *Smart ASN*
Oleh: Erfi Muthmainah, SS, MA (Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI)



LAVA~DIAN
LAKSUKAN KEGIATAN KEMAJUAN BERKUALITAS



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF

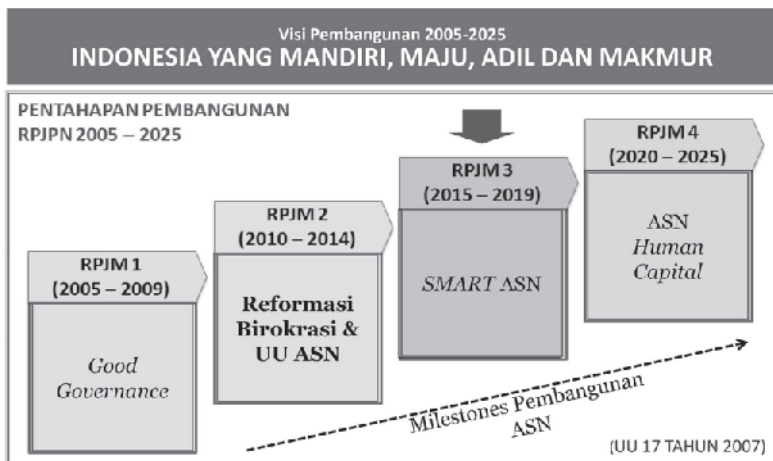


PEDULI

Good Leader Education Public
POPEL
Innovative Pedagogical

RPJMN 2015-2019

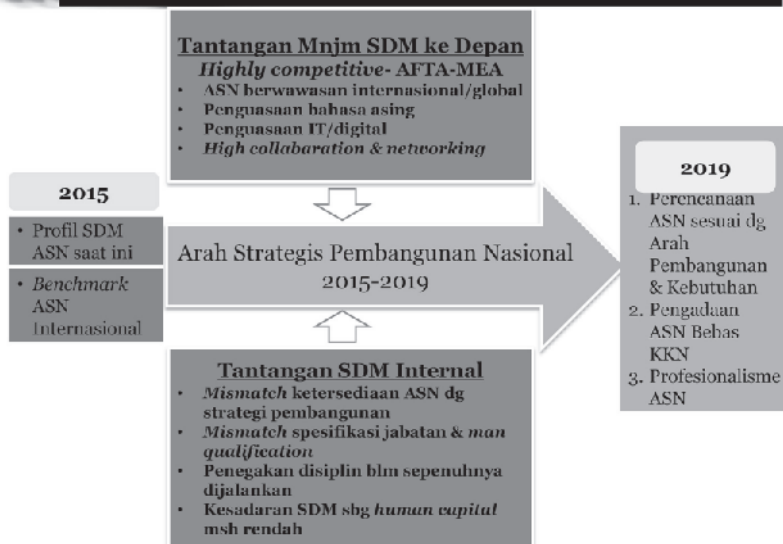
ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025

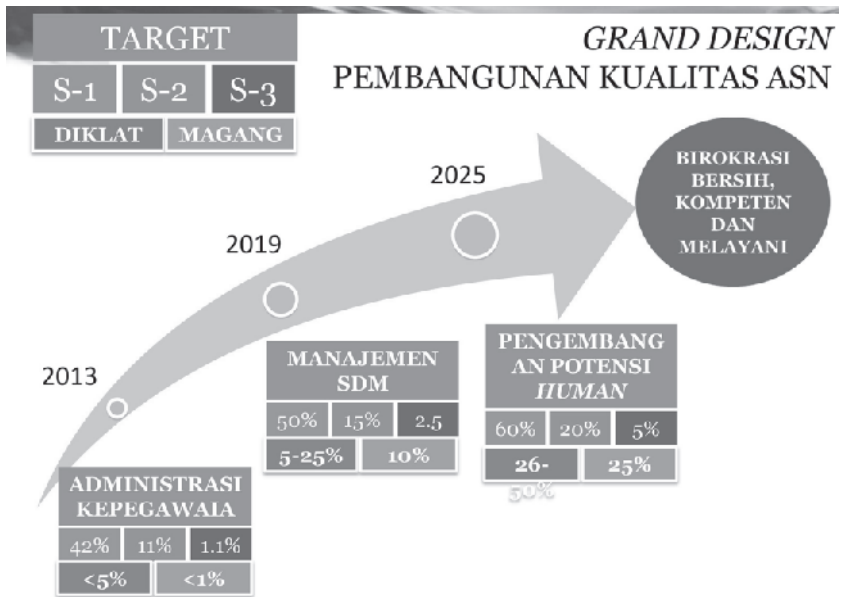


STRATEGI PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019



ROADMAP PEMBANGUNAN ASN 2015 - 2019





SASARAN 1:
Perencanaan ASN Sesuai Kebutuhan

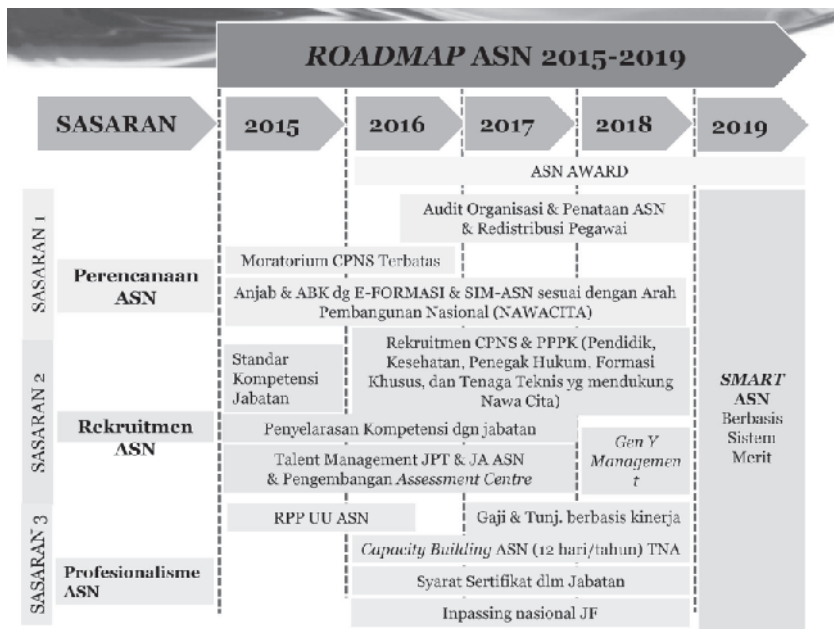
SASARAN 2:
Rekrutmen ASN yg Transparan & Bebas KKN

SASARAN 3:
Profesionalisme ASN

Terwujudnya Profesionalisme ASN, akan dicapai melalui arah kebijakan:



1. Pemetaan standar kompetensi jabatan dan kompetensi individu
2. Sertifikasi kompetensi
3. Penguatan jabatan fungsional
4. Mutasi dan rotasi sesuai kompetensi (>5 Thn)
5. **Capacity Building ASN**
 - Peningkatan jenjang pendidikan Formal
 - Diklat berbasis “gap” kompetensi indiv. & jabatannya (Poin 1)
 - Internship, coaching & counseling
6. Pengukuran kinerja individu & disiplin
7. Peningkatan kesejahteraan berbasis kinerja



ASN Diarahkan pada

- Aparatur sipil negara berkelas dunia, world class civil service
- Mempunyai perspektif multikultural dan kecakapan mengelola keragaman.
- Memiliki perspektif *whole-of-government*, yaitu memahami dan mencari solusi terhadap masalah berbasis pada pandangan yang koheren dari kepentingan pemerintah secara keseluruhan

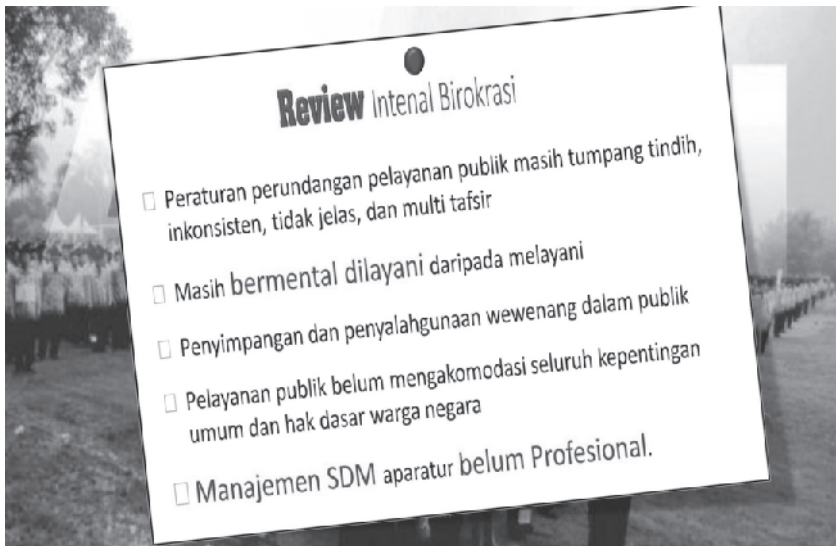
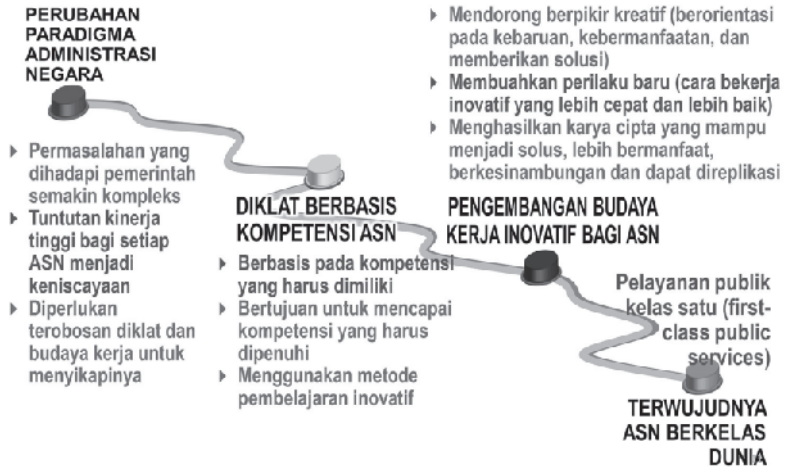
Sosok ASN Berkelas dunia

- Profesional: kompeten, tunduk pada etika profesi, dan mampu memanfaatkan iptek.
- Integritas: trustworthy, mampu mengelola konflik kepentingan, dan imparial
- Orientasi kepublikan: menempatkan kepentingan publik diatas yang lain, bertindak lintas institusi dan tingkat pemerintahan (whole-of- government)
- Budaya pelayanan yang tinggi: kepentingan dan kepuasan warga sebagai kriteria pengambilan keputusan, mindset sebagai agen/ abdi warga
- Wawasan global; outward looking dan mampu membaca perubahan lingkungan strategis, termasuk lingkungan global.

Konteks Global Pembangunan SDM Aparatur

- Fakta dunia kerja saat ini: *“one workplace, multiple generations”*. Potret generasi kerja ASN dimotori oleh Generasi *Baby Boomers* (30%), *Generasi X* (30%) dan *Generasi Y* (40%).
- Estimasi thn. 2025: 75% generasi kerja dunia dimotori generasi Y (generasi millenia), yang berkarakter: penguasaan IT, kecepatan & efisiensi kerja, inovasi berkelanjutan.
- Pegawai ASN harus mampu mengimbangi dinamika & tuntutan global dengan terus mengembangkan kompetensi dan mentalitas panutan yang dibangun secara terprogram, integratif dan berkelanjutan.

PETA JALAN PENINGKATAN PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI DIKLAT BERBASIS KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA INOVATIF



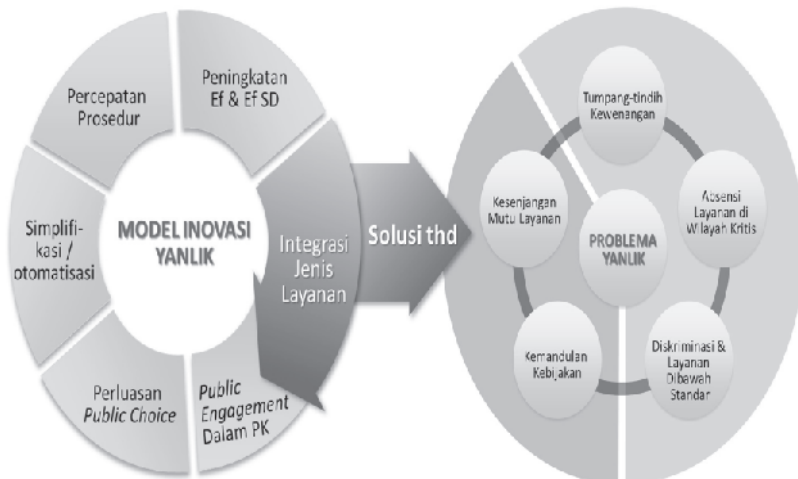
Review Intenal Birokrasi

PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK PERSEPSI INTERNAL BIROKRASI

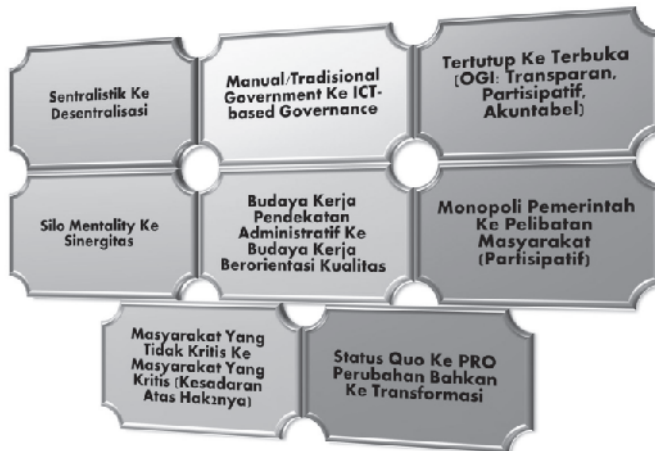
• Efektivitas peraturan perundang-undangan	Peraturan perundang-undangan di bidang pelayanan publik yang masih timpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir
• Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set)	Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik
• Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik
• Pelayanan Publik	Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk.
• SDM Aparatur	Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi.

13

Model Inovasi Pelayanan Publik



Urgensi INOVASI



MASN belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak sesuai dengan tuntutan nasional dan tantangan global

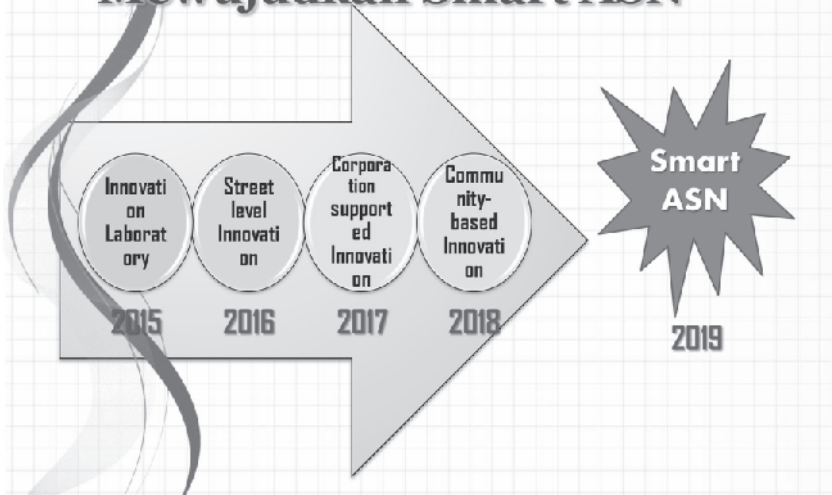
mewujudkan cita-cita bangsa dan tujuan negara

reformasi birokrasi, perlu ditetapkan ASN sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya, dan wajib bertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan MASN

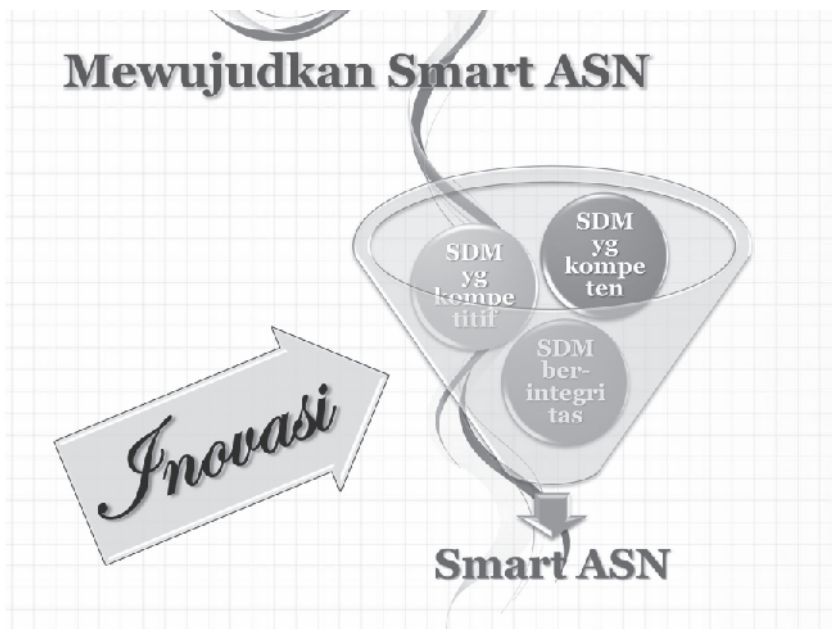
ASN yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik

perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 45

Roadmap Inovasi Dalam Mewujudkan Smart ASN



Mewujudkan Smart ASN



Inovasi Faktual yang Membangun Smart ASN

ASN Kompeten

1. Champions of Innovation (agen penggerak inovasi);
2. Home Business Camp;
3. Kampung Tangguh Bencana;
4. Sambung Rasa Kopi Darat;
5. Kaka Primas;
6. Ipin Bernang Berdasi;
7. Komunitas Koma;
8. SIM Bara;
9. Polpelsumat (Telepon Pelayanan SK Kematian);
10. Bayar Raskin dengan Sampah.

ASN Kompetitif

1. Pendaftaran Perizinan Secara Paralel;
2. Klinik Koperasi Sehat;
3. Mula Jamila (Mengantar Buku Audalan, Jaminan Kepuasan Pemustaka);
4. One Stop Kelahiran (Keluar Bersama);
5. Kawitwangi My Destiny;
6. Gema Lancap Vaselromi;
7. Mbangun Kampung;
8. Karangwanu Nyaman HumL;
9. Teluk Lubuk Bebas Pasung.

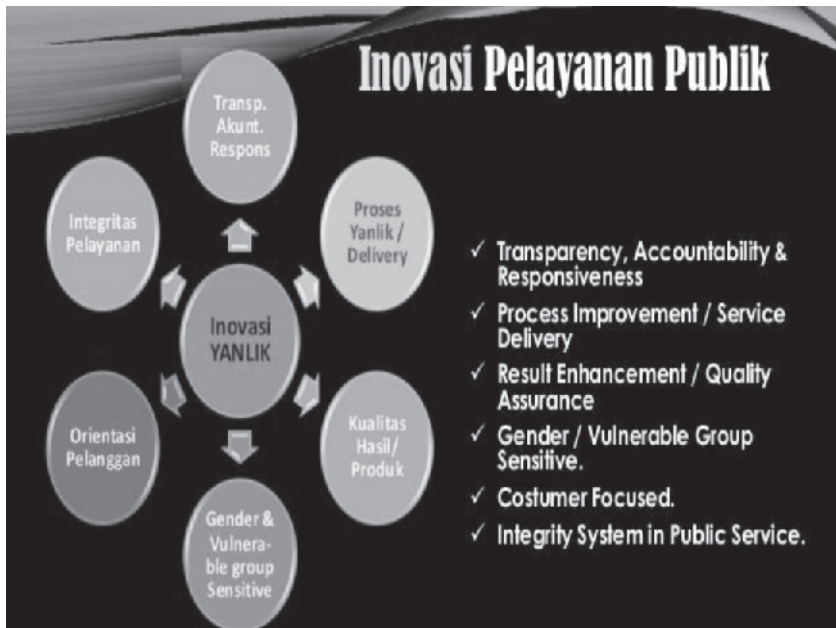
ASN Integritas

1. Taman Edukasi Keselamatan Lalu Lintas;
2. Konsultasi Belajar Siswa;
3. Layanan Tiket Online Taman Pintar;
4. Klinik Konsultasi Good Governance;
5. One Stop Service Keterangan Domisili Perusahaan;
6. Akibat Suka Facebook.

Area Inovasi Dalam Rangka Implementasi RMRB 2015-2019

KELEMBAGAAN	SDM APARATUR	PELAYANAN PUBLIK
<ul style="list-style-type: none"> • Audit/ Review Organisasi K/L/ Pemda. • Desain kelembagaan birokrasi. • Penataan Kelembagaan untuk mendukung Prioritas Presiden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelesaian peraturan pelaksanaan UU ASN. • Akselerasi implementasi UU ASN secara konsisten. • Penyempurnaan sistem diklat untuk mendukung kinerja. • Penguatan budaya integritas, budaya kinerja, dan budaya melayani. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. • Modernisasi sistem dan manajemen Pelayanan Publik (SDM, ICT, Standar Pelayanan). • Monitoring dan supervisi kinerja pelayanan publik. • Membuka ruang partisipasi publik melalui <i>Citizen Charter</i>. • Penguatan integritas dalam pelayanan publik.

Inovasi Pelayanan Publik



KRITERIA inovasi



TRAI WIDODO W. UTC

AREA INOVASI PELAYANAN PUBLIK



Inovasi Pradik
Inovasi untuk pencapaian aktifitas barang/jasa untuk meningkatkan kualitas, cara, fungsi dll. dari barang/jasa.



Inovasi Konsep
Inovasi untuk perubahan cara pandang atas masalah yang ada sehingga memunculkan solusi atas masalah.



Inovasi Metode
Inovasi dalam sebuah penerapan strategi, cara, dan teknik baru untuk mencapai hasil yang lebih baik seperti strategi, cara, dan teknik baru.



Inovasi Proses
Inovasi untuk meningkatkan kualitas proses kerja baik internal maupun eksternal agar lebih sederhana dan lebih efisien seperti standar operasional prosedur (SOP), tata laksana, sistem, dan prosedur.

Inovasi untuk bentuk dan mekanisme baru dalam berhubungan dengan pihak lain dari terapanya tujuan bersama



Inovasi untuk untuk kebijakan atau penggunaan dari teknologi baru yang lebih efektif dan mampu memecahkan masalah



Inovasi untuk perbaikan kebijakan untuk meningkatkan kualitas, cara nilai dan kapasitas dan sumber daya manusia (SDM).



Inovasi untuk pengedapan model organisasi baru yang menggantikan model lama yang tidak dapat perkembangan organisasi



KUNCI KEBERHASILAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK



KEPEMIMPINAN



INTEGRITAS



HUBUNGAN BAIK


B. Peran Balitbangnovda dalam Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Sumatera Selatan

Oleh : DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Plt. Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan)



PERAN BALITBANGNOVDA DALAM MENGEMBANGKAN SISTEM INOVASI DAERAH SUMATERA SELATAN

DISAMPAIKAN PADA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI NASIONAL KELITBANGAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR IV LAN

26 APRIL 2016



DR. Drs. ALAMSYAH, M.Pd
Plt. Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan



Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan



RPJMD 2013-2018

Pembangunan menyeluruh di semua bidang, peningkatan daya saing berbasis keunggulan SDM, infrastruktur wilayah, IPTEK, dan suasana wilayah yg kondusif

SUMATERA SELATAN SEJAHTERA, LEBIH MAJU DAN BERDAYA SAING INTERNASIONAL

VISI

MISI

**Misi pertama :
PRODUKTIVITAS**

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

**Misi kedua :
STABILITAS**

Memantapkan stabilitas daerah

**Misi ketiga :
EKUITABILITAS**

Meningkatkan pemerataan yang berkeadilan

**Misi keempat :
SUSTAINABILITAS**

Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penanggulangan bencana

TUJUAN

Tujuan ke -9 :
Mengembangkan dan mendayagunakan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi (IPTEKIN) secara bersistem

SASARAN

Menguatnya Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

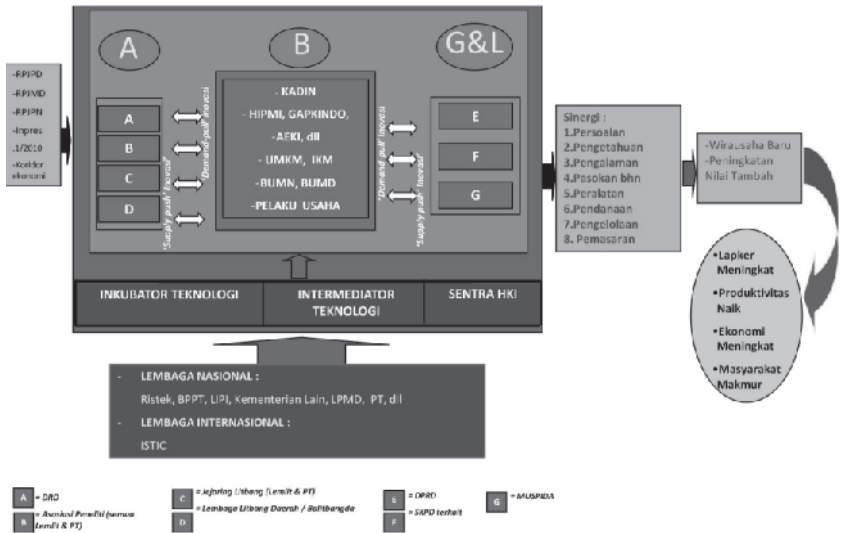


Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan

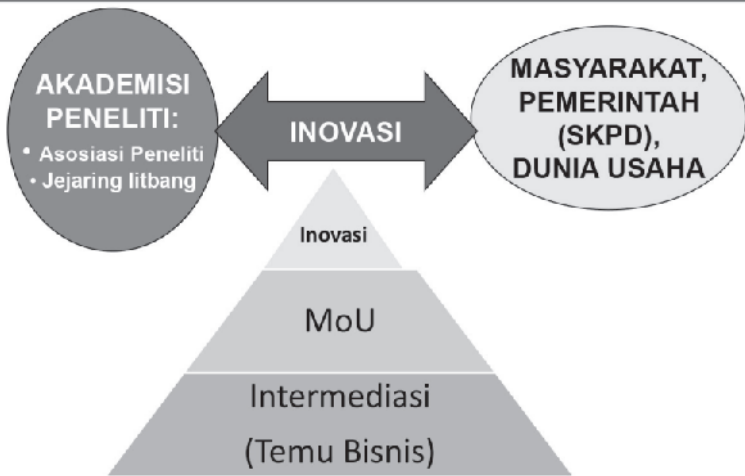
VISI : Penggerak inovasi berbasis potensi unggulan daerah menuju Sumatera Selatan sejahtera

- MISI :**
1. Memperkuat Sistem Inovasi Daerah (SIDa) untuk mendorong tumbuhnya bisnis inovatif
 2. Mengembangkan jaringan Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (Iptekin), Science Tekno Park (STP) dan Pusat Inovasi di Kabupaten/kota
 3. Mendorong kebijakan berbasis hasil litbang
 4. Meningkatkan Kompetensi Sumber daya Manusia (SDM) dan Standar pelayanan

Sistem Inovasi Daerah SUMATERA SELATAN



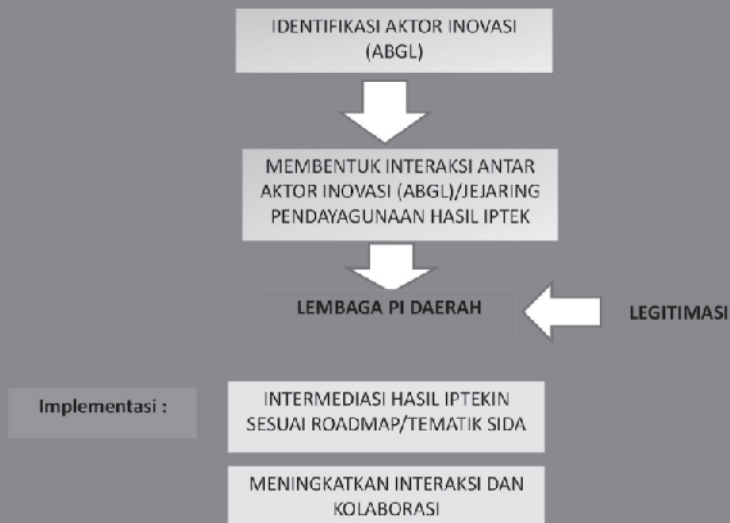
PENGUATAN JARINGAN SIDA

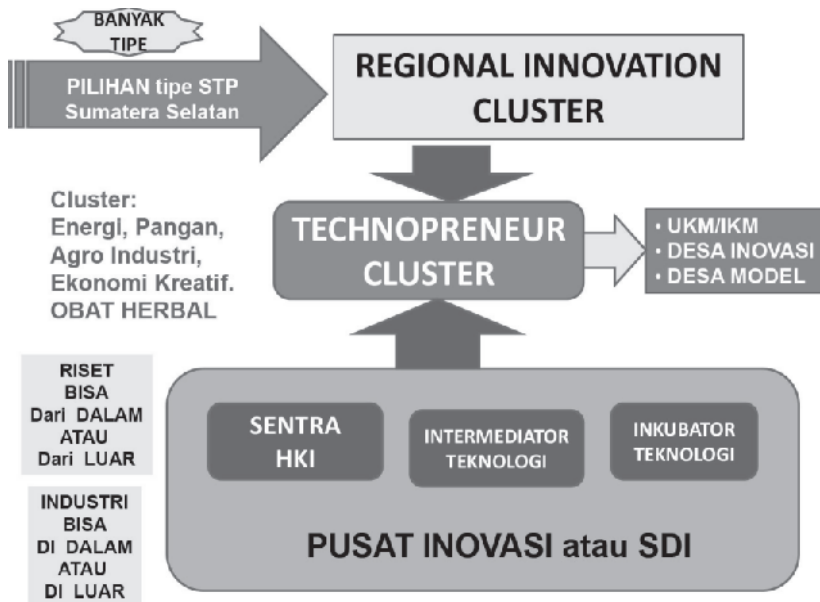


PERAN PUSAT INOVASI

1. Merangsang dan mengatur arus pengetahuan dan teknologi antar universitas, lembaga R&D, perusahaan, dan pasar;
2. Memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui **inkubasi dan proses spin-off**;
3. Menyediakan **layanan nilai tambah** lainnya melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi.

MEKANISME PEMBENTUKAN PI DI DAERAH





PUSAT INOVASI di SUMATERA SELATAN

- **PUSAT INOVASI:**
 - INTERMEDIATOR TEKNOLOGI
 - INKUBATOR TEKNOLOGI
 - SENTRA HKI
- **TARGET PUSAT INOVASI:**
 - PUSAT INOVASI (SDI) PEMPROV
 - PUSAT INOVASI di PERGURUAN TINGGI
 - PUSAT INOVASI di LEMBAGA LITBANG
 - PUSAT INOVASI KAB/KOTA (2015: Inisiasi 3 Kab)

DISTRIBUSI PERAN DAN SINERGI UNSUR AKADEMISI-BISNIS-PEMERINTAH-LEGISLATIF

No	INSTANSI	KONTRIBUSI
1	Kementerian (RISTEK)	Pengarah, Paket Insentif , supervisi, dll
2	Pemprov Sumsel & Kab/Kota: •DRD •DPRD •Balitbangnovda, • Bappeda, • Disperindag, • Diskop UKM, • Dinas lain sesuai tema	<ul style="list-style-type: none"> •Pengarah •Dukungan kebijakan dan penganggaran •Inkubasi teknologi, Inkubasi calon wirausaha, transfer teknologi, pendampingan, advokasi, fasilitasi HKI, intermediasi, prototipe produk/alat. •Alokasi Pendanaan •Promosi, pemasaran, bantuan peralatan •Studi banding pengrajin, promosi, pemasaran, penguatan koperasi, modal koperasi •Bantuan bahan dan alat
3	Lembaga Litbang Perguruan Tinggi/LPNK/LPK	Riset, Prototipe alat dan produk, standarisasi produk, transfer teknologi, pendampingan.
4	KADIN (HIPMI, GAPKINDO, DLL)	Survei pasar, kewirausahaan, <i>marketing</i> strategi dan jaringan pemasaran
5	BUMN/Swasta	Program KBL dana CSR

SERAMBI DIFUSI IPTEK SUMSEL PADA BALITBANGNOVDA SEBAGAI PUSAT INOVASI UMKM

Serambi Difusi IPTEK :

Wadah penghubung pelaku litbang sebagai penghasil inovasi/inovasi dengan masyarakat/dunia usaha



Difusi IPTEK :

Penerapan hasil inovasi untuk meningkatkan daya guna potensinya (UU No.18/2002)

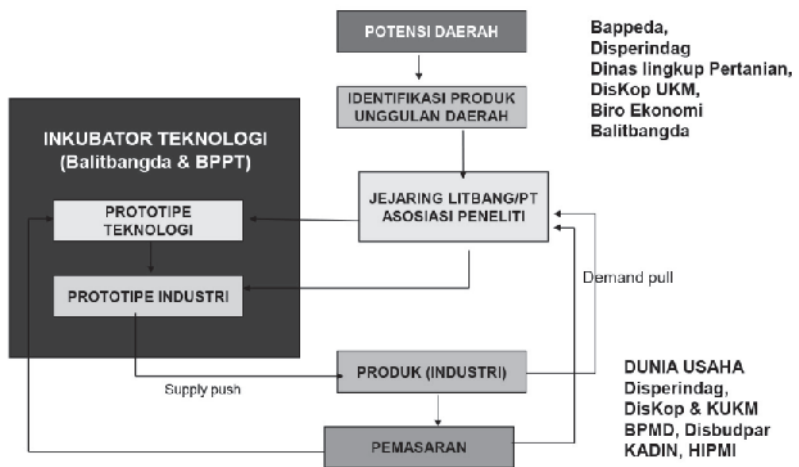


SERAMBI DIFUSI IPTEK (SDI) SUMSEL

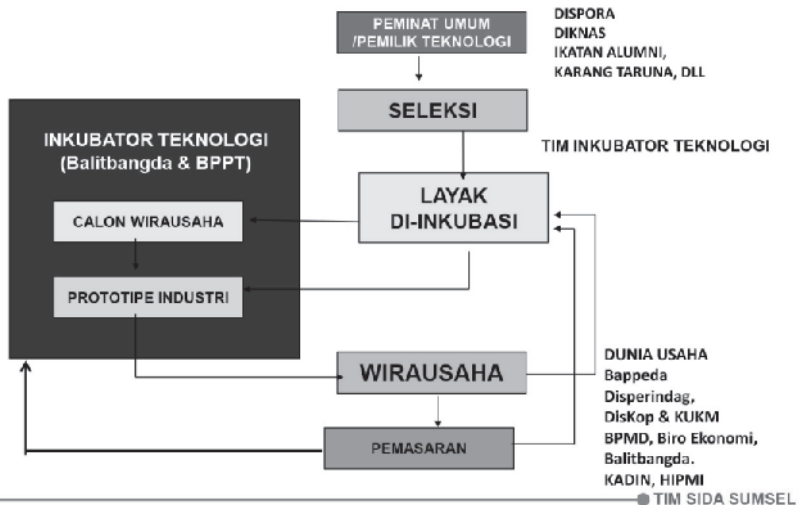
SK Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumsel Nomor : 124.A.KPTS/BALITBANGNOVDA/2008 tentang Pengelola SDI Sumsel sebagai lembaga intermediasi Provinsi Sumsel

Diperbaharui oleh SK Gubernur Sumsel Nomor : 212/KPTS/BALITBANGNOVDA/2014 tentang Tim SDI Provinsi Sumsel

INKUBATOR TEKNOLOGI SEBAGAI PUSAT INOVASI



INKUBATOR TEKNOLOGI SEBAGAI PENCETAK WIRAUUSAHA MUDA

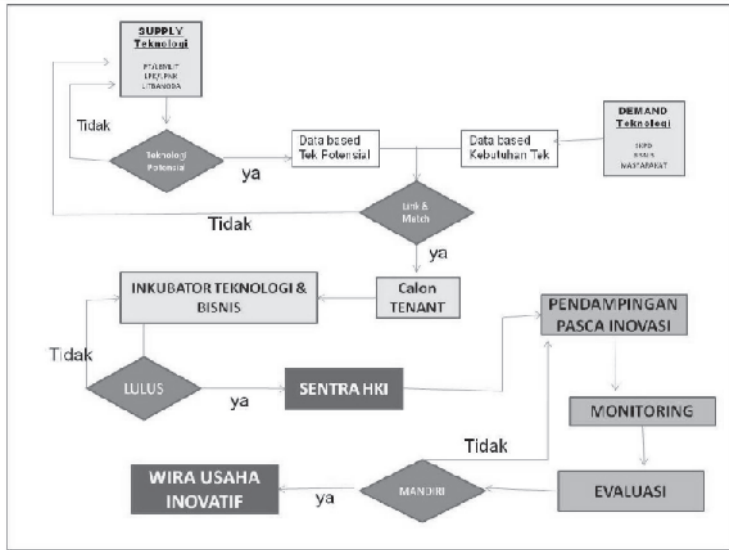


FORUM INKUBATOR TEKNOLOGI SUMSEL

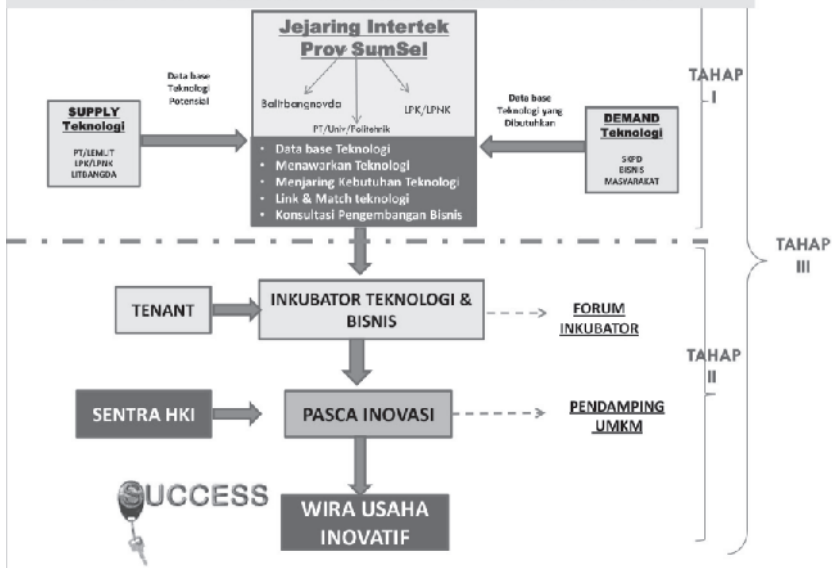
1. **INKUBATOR TEKNOLOGI BALITBANGNOVDA**
2. **INKUBATOR BISNIS dan KEWIRAUUSAHAAN TEKNOLOGI STIMIK MDP**
3. **INKUBATOR MAHASISWA WIRAUUSAHA POLTEK SRIWIJAYA**
4. **PUSAT INKUBASI BISNIS dan KEWIRAUUSAHAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**
5. **PUSAT INOVASI dan INKUBASI BARANG JADI KARET BARISTAND**
6. **BINA DHARMA ENTREPRENEURSHIP CENTRE**

MEKANISME

JEJARING INTERTEK dalam SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG



SISTEM PENDAYAGUNAAN HASIL LITBANG



PENGALAMAN BALITBANGNOVDA SELAKU KOORDINATOR IPTEKIN DAN KELITBANGAN DI WILAYAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Advokasi dan Pendampingan pembentukan lembaga litbang daerah
Tahun 2015 : Kabupaten Banyuasin : Bappeda dan Litbang Kabupaten Banyuasin
2. Pendampingan Implementasi kebijakan SIDA
Tahun 2015 :
 - Advokasi dan pendampingan Pembentukan tim koordinasi Penguatan SIDA : Kabupaten Musi Rawas, Muara Enim, Banyuasin dan Kabupaten Musi Rawas Utara (*capacity building* tim koordinasi SIDA)
 - Pendampingan penyusunan Roadmap Penguatan SIDA : Kab. Banyuasin (dokumen) dan Kabupaten Musi Rawas (*capacity buliding*)
 - Pendampingan penyusunan Masterplan SIDA : Kab. Muara Enim
3. Pendampingan pembentukan Pusat Inovasi di Kab/ Kota
Tahun 2015 : Musi Rawas, Muara Enim, dan Banyuasin
4. Pengembangan *Science Techno Park*
Tahun 2015 :
 - Revitalisasi *Agro Techno Park* sebagai *Science Techno Park* (Penyusunan FS, DED, dan MP STP di Kabupaten Ogan Ilir
 - Pembangunan Kebun Raya Sumsel di Kabupaten Ogan Ilir

PENGHARGAAN UNTUK SUMSEL DI BIDANG IPTEKIN

PRESTASI SUMSEL BERGIAT DALAM IPTEK DAN INOVASI

- 2011 : Penghargaan Anugerah Iptek Pra-yogasala sebagai "Pranata Litbang Daerah Terbaik"
- 2012 : Penghargaan Anugerah Iptek Budhapura di Bidang "Kelembagaan Iptek"
- 2013 : Penghargaan Anugerah IPTEK Budhapura di bidang "Penguatan Jaringan Iptek".
- 2013 : Provinsi Pelopor Penerapan Sistem Inovasi Daerah
- 2014 : Provinsi yang memiliki Badan Penelitian Pengembangan Daerah (BPPD) Kategori Utama (Anugerah Iptek Budhapura Kencana)
- 2014 : "TOP 33 INDONESIA" inovasi Pelayanan Publik melalui Program Serambi Difusi Iptek
- 2015 : Provinsi sebagai Pelaksana SIDA secara Mandiri (Anugerah Iptek Pemerintah Provinsi Budhapura Kencana)
- 2015 : Provinsi yang memiliki Badan Penelitian Pengembangan Daerah (BPPD) Kategori Utama



KESIMPULAN

- Pemerintah Sumatera Selatan telah menerbitkan kebijakan-kebijakan sebagai landasan legal untuk pengembangan daerah berbasis SIDA.
- Perkuatan kelembagaan, sumberdaya dan jaringan terus ditingkatkan dan dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan
- Implementasi SIDA untuk IKM/UKM telah terbukti dapat membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan

76

C. Peran Kelitbangan Daerah dalam Mewujudkan *Smart ASN*

Oleh : Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kepala Bidang Kajian Kebijakan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV LAN)



Peran kelitbangan
Daerah dalam
Mewujudkan
Smart ASN

Oleh
Nurul Hidayah
Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara
PKP2 A IV LAN

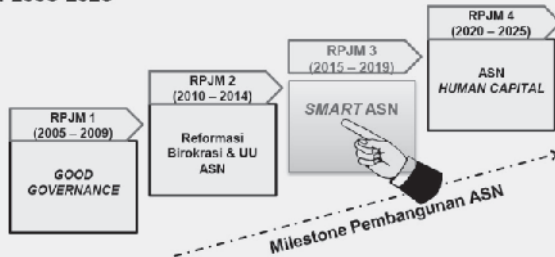
RPJMN 2015-2019

ADALAH RPJMN KE III DALAM RPJPN 2005-2025

Visi Pembangunan 2005-2025

INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR

PENTAHAPAN PEMBANGUNAN
RPJPN 2005-2025



(UU 17 TAHUN 2007)

3 Program menuju Smart ASN 2019

1. Perencanaan harus sesuai arah pembangunan dan kebutuhan;

2. Rekrutmen ASN harus bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN);

3. Terciptanya profesionalisme ASN.

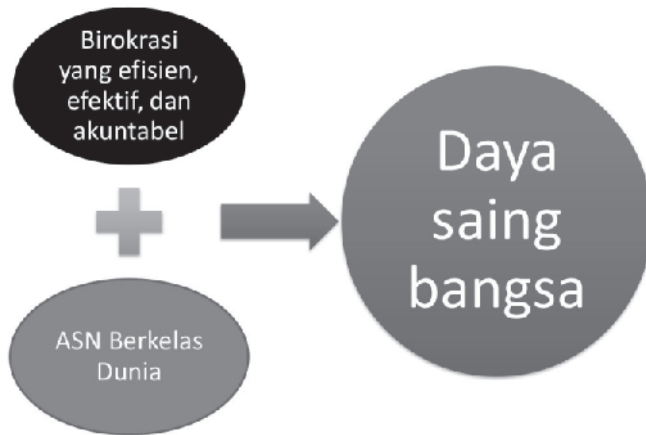
TANTANGAN BIROKRASI



TANTANGAN BIROKRASI



World-Class Government



ASN berwawasan global



Fungsi Litbang

Merupakan unsur pendukung dalam setiap institusi yang bertugas melakukan penelitian dan pengembangan sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing

Garis-garis besar tugas kelitbangan

1. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan;
2. pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
3. pelaksanaan pengkajian kebijakan;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan;

Lanjutan.....

5. pelaksanaan fasilitasi inovasi daerah;
6. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri/Pimpinan Badan/lembaga/Pe-merintah Daerah

DASAR HUKUM PENGUATAN LITBANG



UU No. 18 Tahun 2002
*Tentang Sistem Nasional
Penelitian dan
Pengembangan dan
Penerapan IPTEK.*

Pasal 8

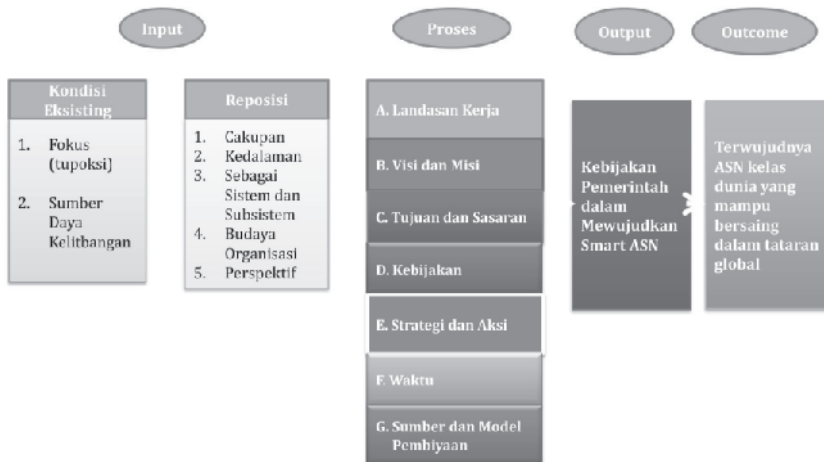
- (1) Lembaga litbang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi *menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), lembaga litbang *bertanggung jawab mencari berbagai invensi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menggali potensi pelayagunaannya.*
- (3) Lembaga litbang dapat berupa *organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.*

Kaitannya dengan *persaingan global*

Pasal 4 Undang-undang nomor 18 tahun 2002;

- Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bertujuan memperkuat daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi bagi keperluan mempercepat pencapaian tujuan negara, serta meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional.

Alur Pikir



Kondisi Litbang Pemda

Dimensi	Kini	Akan Datang
Cakupan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reaktif (sesuai permintaan dan kebutuhan komponen/daerah) 2. Memecahkan masalah secara parsial 3. Statis (kurang kreatif dan inovatif) 4. Berpikir jangka pendek 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Responsif (memahami tantangan yg dihadapi & menjawab secara komprehensif) 2. Mencari dan memecahkan akar masalah (komprehensif) 3. Transformatif dari waktu ke waktu 4. Berpikir jangka panjang
Sasaran	<i>Personal oriented</i>	Mencari strategi agar hasil penelitian dapat dijadikan rujukan kebijakan pemerintah
Hubungan Sistem dan Subsistem	Litbang sbg sebuah sistem <i>an sich</i>	Litbang sbg sebuah sistem dan menjadi bagian dari sistem lain yg lbh besar
Budaya Organisasi	<i>Status quo</i>	Pro perubahan
Perspektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat ke dalam 2. Sulit berkembang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melihat ke luar 2. Elit dan membanggakan

Litbang sbg Sebuah Sistem & Subsystem

Pra Penelitian	In Penelitian			Pasca Penelitian
Input	Pra (Lit)	In (Lit)	Pasca (Lit)	Output
Komponen, Daerah, K/L lain dan Litbang	Persiapan	Pelaksanaan	Pelaporan	Outcome ↓ Impact ↓ Benefit
	Litbang, Komponen, Daerah, K/L lain			Komponen, Daerah, K/L lain dan Litbang

Permasalahan umum kelitbangan



Kelembagaan

Lahirnya PP No. 41 Tahun 2007 menimbulkan multi tafsir terhadap keberadaan Balitbang Daerah.

- Ada beberapa daerah yang telah menghapus Balitbang Daerahnya dan kembali digabungkan dengan Bappeda.
- Dalam Kondisi seperti ini kecil kemungkinan Balitbangda mampu meningkatkan kinerjanya sebagai pemberi rekomendasi bagi penetapan kebijakan.

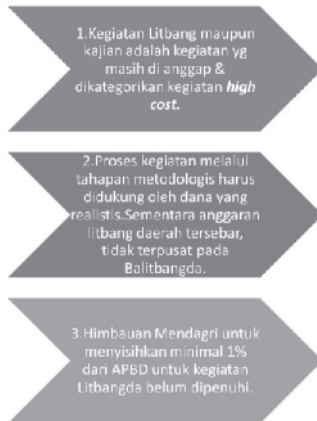
Personil atau SDM

Keterbatasan peneliti baik dari segi kuantitas maupun kualitas merupakan salah satu kendala keberlangsungan eksistensi Balitbangda.

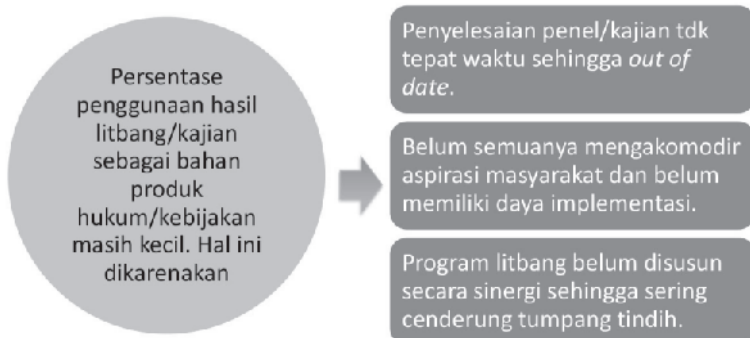
- **Secara Kualitas**, banyak hasil litbang yang berupa rekomendasi seringkali bersifat tidak realistis. Tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena tidak dilakukan dengan tahapan metodologis.

Secara Kualitas, Banyak Balitbang Daerah yang memiliki sedikit peneliti, bahkan tidak memiliki sama sekali, sehingga kegiatan litbang diserahkan kepada pihak ketiga atau dgn swakelola dengan hasil yang masih jauh dari harapan. Sehingga hasil litbang maupun kajian tidak layak disampaikan sebagai bahan rekomendasi bagi penetapan kebijakan.

Pembiayaan



Program



Kesimpulan

Smart ASN menjadi tuntutan yang harus dipenuhi dalam menjawab tantangan global yang semakin competitive

Litbang sebagai salah satu unsur kelembagaan dalam Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berfungsi menumbuhkan kemampuan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Inovasi menjadi jawaban atas berbagai keterbatasan sebelum melakukan invensi menjadi keniscayaan

D. TANYAJAWAB

a. Trisko Defriyansa, ST, M.Si (Bappeda Kota Lubuk Linggau)

Menyikapi kebijakan yang ada saat ini, Indonesia merupakan negara yang melahirkan banyak kebijakan. Lembaga legislatif selaku lembaga pembentuk kebijakan hendaknya harus memperhatikan kualitas kebijakan yang dibuat jangan hanya tinggi kuantitas saja tapi juga harus kaya fungsi. Kebanyakan kebijakan yang dibuat sangat kaku/rigid, adapula beberapa kebijakan yang tumpang tindih dengan kebijakan lain.

Terkait undang-undang tentang daerah istimewa dan khusus. Apakah masih diperlukan kebijakan tersebut mengingat daerah-daerah yang mendapatkan label kekhususan (otonomi khusus) tersebut merupakan daerah-daerah yang awalnya melakukan gerakan pemberontakan. Jika dapat dianalogikan, apakah untuk mendapatkan perhatian orang tua, seorang anak harus menjadi nakal dulu dan bagaimana cara memperhatikan anak yang sudah baik dan memiliki prestasi?

Pertanyaan selanjutnya terkait dengan implementasi UU ASN yang sejak 2014 sudah diterbitkan, sampai saat ini sudah dua tahun berjalan tetapi belum rampung peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan teknis dari UU tersebut. Kalau bisa saat ini pemerintah harus melakukan percepatan sebagai kunci mewujudkan *smart* ASN maka kesejahteraan pegawai ASN harus distandarkan.

Jawab:

Menghadapi dinamika reformasi dan otonomi daerah, maka perlu adanya penetapan strategi yang secara mantap mampu menghadapi segala gejala perubahan dimaksud. Strategi yang baik tentunya adalah strategi yang mampu merubah tantangan menjadi peluang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu peraturan yang menjadi titik tolak untuk berubahnya wajah birokrasi di Indonesia. Undang-undang inilah yang diharapkan akan memaksa birokrasi untuk merubah kondisinya yang selama ini sering dikeluhkan masyarakat karena birokrasi yang dianggap lamban, tambun dan berkinerja rendah. Sementara tantangan birokrasi saat ini cukup berat, 2015 adalah tahun dilaksanakannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dengan kinerja birokrasi yang masih jauh di bawah Singapura, Malaysia dan Philipina serta hanya satu tingkat diatas Vietnam, perlu perubahan yang radikal dan cepat untuk terwujudnya birokrasi yang efektif efisien sehingga akan mendorong terciptanya "Pemerintahan Kelas Dunia".

Belum satupun peraturan pemerintah yang diamanatkan UU tersebut diselesaikan oleh pemerintah. Baru satu peraturan presiden yang terbit, yaitu tentang Komisi Aparatur Sipil Negara. Oleh sebab itu, tidak menjalankan perintah undang-undang sejatinya sudah merupakan pelanggaran atas konstitusi yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (Pasal 24C UUD 1945). Dengan demikian, ini bukanlah perkara sederhana. Sebetulnya, tanpa harus ada ancaman atau konsekuensi tersebut pun, jika para pemangku kepentingan di republik ini menaruh perhatian pada membenahan birokrasi, penyelesaian peraturan-peraturan pemerintah yang dibutuhkan akan dilakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulur-ulur waktu.

b. Sakib Arsalam, S.Hi, Lc (PKP2A II Makassar)

Apakah sudah terbangun komunikasi antar litbang di daerah Provinsi Sumatera Selatan serta bagaimana pelibatan lembaga-lembaga litbang di daerah untuk membangun kesejahteraan di Provinsi Sumatera Selatan?

Jawab:

Kekuatan unsur penelitian dan pengembangan (litbang), terutama dalam segala lini dan sektor pemerintahan menjadi sangat strategik dan mengedepan. Dengan demikian peran dan fungsi institusi litbangda perlu diberdayakan dalam rangka memberikan kontribusi nyata bagi adanya perubahan tatanan hidup secara lebih baik dan kondusif. Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan diantaranya adalah dengan mengembangkan konsep jejaring litbang dalam rangka pencapaian visi dan misi litbang secara lebih luas. Pemerintah daerah Sumatera Selatan telah membentuk jejaring litbang yang beranggotakan lembaga-lembaga litbang daerah kabupaten/kota. Hal ini senada dengan prinsip manajemen modern, suatu organisasi atau lembaga akan mampu memberikan hasil optimal apabila memiliki jejaring (*networking*) yang kuat. Jejaring litbang di Sumatera Selatan secara ekspektatif berperan sebagai fasilitator, organisator, konseptor, dan motivator yang memungkinkan adanya ruang gerak secara luas, sesuai kapasitas peran dan fungsinya tersebut.

c. Kiagus Muhammad Akib, S.Sos, M.AP (Kominfo Ogan Komering Ulu)

Menyikapi Rakornas Litbang dengan tema peran lembaga litbang di daerah dalam mewujudkan *smart* ASN merupakan kegiatan yang sejalan dengan program pemerintah dan harus secara serius didiskusikan. Forum

ini nantinya diharapkan akan membuka pengetahuan dan wawasan bagi peserta yang terlibat untuk meningkatkan peran lembaga/instansinya dalam mencapai *smart* ASN di daerah.

Terkait pelayanan publik di daerah, saya memimpikan suatu saat nanti pelayanan publik di Indonesia sistem pelaksanaannya seperti *olx.co.id* yang bisa diperjualbelikan dan dapat dikirim ke rumah langsung dengan jumlah biaya serta waktu penyelesaiannya yang jelas.

Selanjutnya saya mengharapkan LAN sebagai pusat kajian bisa mampu melahirkan inovasi-inovasi yang dapat diimplementasikan di daerah-daerah. Karena pada hakikatnya inovasi akan menjawab berbagai macam keterbatasan.

Jawab:

Pemerintah daerah mesti memiliki kemampuan berinovasi guna menjalankan fungsinya. Terkait dengan itu, *driving force* utama sebagai mesin penggerak sistem kerja ini adalah dengan adanya dukungan inisiatif prinsipil atau *political will* dari kepala pemerintahan setempat dalam membuka ruang pembangunan sedemikian rupa yang pada hakikatnya bermuara pada adanya empati dan keyakinan kuat dalam memobilisasi wacana dan gerakan ini sebagai sebuah upaya pembangunan daerah. Inovasi bagi pemerintah daerah merupakan suatu keharusan guna mengimplementasikan substansi dari pelaksanaan desentralisasi yaitu mengupayakan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakatnya berdasarkan aspirasi dan potensi lokal serta pengentasan kemiskinan secara berkesinambungan. Hal ini dapat kita lihat pada pengalaman Prefektur Oita di Jepang yang melakukan inovasi program di tahun 1979 melalui gerakan *One Village One Product* (OVOP) yang terbukti mampu mengubah Oita yang sebelumnya terbelakang secara ekonomi menjadi sebuah daerah yang sukses secara ekonomi. Untuk kasus Indonesia, telah banyak daerah yang melakukan inovasi program untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Sebut saja Kabupaten Jembrana dalam peningkatan pelayanan publik dan perekonomian daerah, Kabupaten Banjarnegara melalui Pembenahan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banjarnegara, Kabupaten Deliserdang melalui pembentukan LEPP-M3 sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, Kabupaten Gianyar melalui Gianyar Sejahtera, Kabupaten Sumba Timur melalui pelatihan aparatur pemerintah desa.

Narasi tentang daerah yang bekerja keras untuk kemakmuran rakyatnya mungkin juga banyak di daerah-daerah lain. Hanya saja karena keterbatasan informasi sehingga tidak memungkinkan untuk diketahui oleh publik. Tetapi yang paling penting adalah harusnya semua daerah

berlomba dengan waktu untuk memikirkan dan melaksanakan program inovasi bagi kepentingan kesejahteraan warganya.

Program inovasi yang telah diimplementasikan banyak pemerintah kabupaten tentu akan dapat menjadi inspirasi ataupun pelajaran dan contoh bagi daerah lain. Merujuk pada pengalaman daerah-daerah dan kerangka teori yang ada, sebuah inovasi adalah merupakan proses yang dimulai dengan keinginan untuk menjadi lebih baik yang kemudian dilanjutkan dengan usaha untuk mewujudkannya dan membuatnya berjalan dengan baik. Inovasi sangat terkait dengan penemuan di mana secara umum inovasi muncul dari sebuah proses *trial and error* dan bukan dari sebuah perencanaan besar. Dalam menyusun program inovasi ini maka faktor-faktor yang mejadi pertimbangan dasar adalah : (1) Komitmen kepala daerah dan aparat birokrasi, (2) Keterlibatan semua *stakeholder* dalam masyarakat, (3) Komitmen untuk efisiensi di semua sektor dan (4) Pemilihan prioritas program yang akan dilakukan disesuaikan dengan kondisi lokal walaupun ada beberapa hal yang merupakan kondisi umum.

Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan agar semua daerah semestinya lebih berpikir untuk menemukan program inovasi sesuai dengan konteks daerahnya. Sebab program inovasi pemerintah daerah senantiasa berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas hidup dari banyak masyarakat di banyak daerah. Disinilah peranan pendidikan tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih strategis untuk membantu pemma dalam mewujudkannya.

E. Hasil Diskusi Rakornas Kelitbangan

Hasil diskusi peserta rakornas membahas tiga isu penting terkait:

No	Konten	Saran dan Masukan
1	Pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep inovasi pelayanan publik dalam kerangka UU ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyederhanaan regulasi terkait dengan pelayanan publik mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. 2. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik dihilangkan dari yang manual sistem ke berbasis web/IT 3. Peningkatan kompetensi ASN berbasis profesional dan keahlian

		<p>4. Dalam rangka pencegahan lambatnya pelayanan publik ke masyarakat maka dibutuhkan standarisasi sistem penggajian dari pusat sampai ke daerah.</p> <p>5. Diadakan inovasi manajemen SDM sektor publik untuk implementasi efektif dalam pelayanan publik ada tidaknya dampak positif dari suatu inisiatif perubahan harus berkesinambungan dan tidak tergantung pada konseptornya.</p>
2	Pemahaman Bapak/Ibu tentang pentingnya peran ASN dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik	<p>1. ASN adalah pelayan terdepan seyogyanya harus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik pada publik.</p> <p>2. Harus ada komitmen dari personal ASN sendiri untuk perubahan yang lebih baik.</p> <p>3. ASN berkewajiban mewujudkan inovasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berdedikasi tinggi.</p> <p>4. Peran ASN dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik sangatlah penting sebagai terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.</p>
3	Strategi penguatan jejaring kelitbangan dalam mewujudkan <i>smart</i> ASN	<p>1. Penguatan kelitbangan dalam mewujudkan <i>smart</i> ASN guna mewujudkan infrastruktur yang handal</p>

BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Rakornas Litbang Se-Sumatera yang dilaksanakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan ini merupakan Rakornas ke 5 (lima) sejak berdirinya Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (PKP2A) IV. Sebagai perpanjangan tangan Lembaga Administrasi Negara (LAN) di wilayah Sumatera, PKP2A IV melalui Rakornas ini berupaya untuk terus mewujudkan agenda reformasi birokrasi salah satunya dengan membangun jejaring yang lebih luas khususnya dalam penelitian dan pengembangan. Terkait dengan hal tersebut, kelitbang daerah tentu memiliki peran yang sangat besar untuk berkontribusi memberikan saran, pemikiran melalui hasil penelitian atau telaahan yang dapat dijadikan rujukan kebijakan pemerintah khususnya pemerintah daerah sehingga dapat mempercepat terwujudnya *smart* ASN.

Berdasarkan hasil pemaparan narasumber, tanya jawab serta diskusi kelompok maka forum secara umum berhasil mengidentifikasi beberapa hal diantaranya:

1. Rakornas yang bertema “Peran Kelitbang Daerah dalam Mewujudkan *Smart* ASN” dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih lemahnya peran serta aparatur kita dalam menghadapi persaingan global, maka memasuki fase ketiga dalam agenda reformasi birokrasi diharapkan pada 2019 kita memiliki *Smart* ASN yang mampu mewujudkan aparatur kelas dunia.
2. Kita menyadari salah satu peran kelitbang adalah mengkaji dan menganalisis berbagai isu strategis yang menjadi permasalahan dalam pembangunan nasional. Oleh karenanya lembaga penelitian dan pengembangan harus peka terhadap isu-isu aktual dan isu strategis yang sedang berkembang. Perlu juga dicermati bahwa kemajuan suatu daerah sangat ditentukan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan pemerintah daerah tersebut.
3. Kita perlu mendorong dan memberikan dukungan agar semua daerah semestinya lebih berpikir untuk menemukan program inovasi sesuai dengan konteks daerahnya. Sebab program inovasi pemerintah daerah senantiasa berkaitan erat dengan upaya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Di sinilah peranan lembaga litbang serta unsur pendidikan tinggi dengan sumber daya yang dimilikinya menjadi lebih strategis untuk membantu pemerintah daerah dalam mewujudkannya.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil pemetaan dan saran-saran yang diberikan peserta, maka Rapat Koordinasi Nasional Kelitbangtan Tahun 2016, menghasilkan butir-butir rekomendasi sebagai berikut:

No	Konten	Rekomendasi
1	Konsep inovasi pelayanan publik dalam kerangka UU ASN	<ol style="list-style-type: none">1. Adanya penyederhanaan regulasi terkait dengan pelayanan publik mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. Sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan yang dapat mengakibatkan kebingungan bagi pemerintah daerah selaku pelaksana kebijakan publik dalam mengimplementasikannya di lapangan.2. Sistem penyelenggaraan pelayanan publik dihilangkan dari yang manual sistem ke berbasis web/IT, sehingga dapat meminimalisir terjadinya korupsi kolusi dan nepotisme yang selama ini berkembang.3. Peningkatan kompetensi ASN berbasis profesional dan keahlian.4. Diadakan inovasi manajemen SDM sektor publik untuk implementasi efektif dalam pelayanan publik ada tidaknya dampak positif dari suatu inisiatif perubahan harus berkesinambungan dan tidak tergantung pada konseptornya.
2	Peran ASN dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none">1. ASN adalah pelayan terdepan seyogyanya harus berinovasi agar dapat memberikan pelayanan terbaik pada publik.2. Harus ada komitmen dari personal ASN sendiri untuk perubahan yang lebih baik.

		<ol style="list-style-type: none"> 3. ASN berkewajiban mewujudkan inovasi pelayanan publik yang terintegrasi dan berdedikasi tinggi. 4. Peran ASN dalam mewujudkan inovasi pelayanan publik sangatlah penting sebagai terobosan dalam menjalankan roda pemerintahan guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung.
3	Strategi penguatan jejaring kelitbangan dalam mewujudkan <i>smart</i> ASN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya forum-forum kelitbangan daerah yang dapat mengkomunikasikan kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan agar terjadi keselarasan dalam pencapaian tujuan. 2. Tersedianya database yang lengkap dan akurat masing-masing lembaga penelitian dan pengembangan agar dapat menjadi rujukan bagi pimpinan daerah dalam hal pengambilan kebijakan .

Lampiran 1
SK Tim dan Jadwal Rakornas Litbang

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
SATKER 680612
PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
APARATUR IV
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (PKP2A IV LAN)
NOMOR: 19/PIV.1/HKM.03.2**

**TENTANG
TIM PELAKSANA RAPAT KOORDINASI KAJIAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Nurul Hidayah, SH, M.Si	Penanggung Jawab
2.	Hilma Yuniasti, S.Hi	Ketua
3.	Rati Sumanti, S.Sos	Anggota
4.	Ervina Yunita, S.Si	Anggota
5.	Henri Sinurat, S.IP	Anggota
6.	M. Ikhsan, S.Pd.I	Anggota

Ditetapkan di : Aceh Besar
Pada tanggal : 4 Januari 2016

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PKP2A IV LAN,**

Faizal Adriansyah

JADWAL RAKORNAS LITBANG
Palembang, 26 April 2016

NO.	WAKTU	KEGIATAN	PELAKSANA
08.00 - 08.30 Registrasi dan Pembukaan			
1	08.00 - 08.30	Registrasi Peserta	Panitia
	08.30 - 09.00	Laporan Penyelenggaraan Rakornas	Kepala Bidang KKI AN PKP2A IV LAN
		Sambutan	Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN
		Sambutan sekaligus pembukaan Rakornas	Asisten IV Bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumatera Selatan
	09.00 - 09.15	<i>Coffee Break</i>	Panitia
09.15 - 13.00 Pemaparan Materi			
Sesi I			
2	09.15 - 09.45	Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah Menuju <i>Smart ASN</i>	Erfa Muthmainah, SS, MA (Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI)
	09.45 - 10.15	Penguatan Jejaring Kelitbang dalam Pengembangan Inovasi Pelayanan Publik di Daerah	Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara PKP2A IV LAN)
	10.15 - 10.45	Peran Balitbangnovda dalam Mengembangkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Sumatera Selatan	Dr. Drs. Alamsyah, M.Pd (Kepala Balitbangnovda Provinsi Sumatera Selatan)

	10.45 - 12.00	Diskusi dan Tanya Jawab	Moderator
	12.00 - 13.00	Istirahat, Makan Siang dan Shalat	Panitia
3	13.00 - 14.30 Diskusi Kelompok		
	13.00 - 14.00	Diskusi Kelompok	Peserta - Panitia
	14.00 - 14.30	Presentasi Kelompok	Peserta - Panitia
4	14.30 - 15.00 Penutupan		
	14.30 - 15.00	Penutupan	Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN RI
	15.00 - Selesai	<i>Coffee Break</i> & Pembagian Sertifikat	Panitia

Lampiran 2
Foto-foto Kegiatan



Peserta Sedang Melakukan Registrasi Kehadiran



Suasana Rakor Kelitbang



Narasumber:

Erfi Muthmainnah, SS, MA (Kapus Inovasi Pelayanan Publik LAN RI),

Nurul Hidayah, SH, M.Si (Kabid KKIAN PKP2A IV LAN),

DR. Drs. Alamsyah, M.Pd (Plt. Kepala Balitbangnovda Sumsel).

Moderator:

Herfiani Rizkia



Serah terima cenderamata (tanda penutupan rakor)



Foto Bersama Narasumber dan Peserta Rakor Litbang



Panitia Rakor Litbang Bersama Asisten IV Pemprov Sumsel dan Kepala Balitbangnovda Sumsel

Kelompok 1:
Pemahaman tentang
konsep inovasi
pelayanan publik
dalam kerangka UU
ASN



Kelompok 2:
Pemahaman tentang
pentingnya peran
ASN dalam
mewujudkan inovasi
pelayanan publik



Kelompok 3:
Strategi penguatan
jejaring kelitbangan
dalam mewujudkan
smart ASN



ISBN 978-602-72014-5-3



9

786027

201453

**PUSAT KAJIAN DAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN APARATUR IV**

Jalan Dr. Mr. T. Muhammad Hasan, Darul Imarah
Aceh Besar 23352. Telp. (0651) 8010900
Fax. (0651) 7552568, Website : www.lan.go.id



INTEGRITAS



PROFESIONAL



INOVATIF



PEDULI